



Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Surat Keputusan Badan Gizi Nasional No. 401.1 Tahun 2025 dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di MIN 10 Bandar Lampung)

Alamsyah Raden Bangsaratu^{1*}, Relit Nur Edi², Nurasari³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, alamsyahrbr@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, relitnuredi@radenintan.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, nurasari@radenintan.ac.id

*Corresponding Author: alamsyahrbr@gmail.com

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis pemerintah guna mengentaskan masalah malnutrisi dan meningkatkan kognisi anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi tata kelola kebijakan tersebut di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung melalui perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta studi dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dan divalidasi keabsahannya menggunakan teknik triangulasi guna memastikan kredibilitas temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola MBG di MIN 10 Bandar Lampung berjalan secara tertib melalui sistem distribusi dua sesi. Ditinjau dari kerangka *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, implementasi ini telah merepresentasikan tiga pilar utama, yakni *Mabda' al-Amānah* (tata kelola distribusi yang tepat sasaran), *Mabda' al-'Adalah* (pemerataan hak gizi dan perlindungan bagi siswa beralergi), serta *Maslahah 'Ammah* (terciptanya efisiensi finansial dan pemenuhan nutrisi praktis). Meskipun secara substansial telah selaras dengan tata kelola ketatanegaraan Islam, evaluasi sisa makanan mengungkap adanya kendala minor terkait kurang presisinya standar proporsi lauk dan buah dari pihak penyedia. Sebagai rekomendasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut memperketat kendali mutu komposisi harian, sementara pihak madrasah didorong untuk menjadikan program ini sebagai ruang edukasi adab makan Islami guna mereduksi kemubaziran pangan.

Kata Kunci: Program MBG, Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional No. 141.1 Tahun 2025, Fiqh Siyasah Tanfidziah.

Abstract: The Free Nutritious Meal Program (MBG), regulated through the Decree of the Head of the National Nutrition Agency of the Republic of Indonesia Number 401.1 of 2025, is a strategic government policy to alleviate malnutrition and improve the cognitive abilities of school-aged children. This study aims to analyze and evaluate the effectiveness of the implementation of the policy's governance at the State Islamic Elementary School (MIN) 10 Bandar Lampung through the perspective of *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. This study employs an

empirical juridical research method with a socio-juridical approach and a case approach. Primary and secondary data collection was conducted comprehensively through field observation techniques, in-depth interviews, and documentation studies. All collected data were then analyzed using a descriptive qualitative method, and their validity was verified using the triangulation technique to ensure the credibility of the research findings. The research results indicate that the governance of MBG at MIN 10 Bandar Lampung runs in an orderly manner through a two-session distribution system. Viewed from the framework of Fiqh Siyasa Tanfidziyah, this implementation has represented three main pillars: Mabda' al-Amānah (well-targeted distribution governance), Mabda' al-'Adalah (equal distribution of nutritional rights and protection for students with allergies), and Maslahah 'Ammah (the creation of financial efficiency and practical nutritional fulfillment). Although it is substantially in line with Islamic state governance, the evaluation of leftover food reveals a minor constraint regarding the lack of precision in the standard proportion of side dishes and fruits from the provider. As a recommendation, the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) is required to tighten the daily composition quality control, while the madrasa is encouraged to utilize this program as an educational space for Islamic eating etiquette to reduce food waste

Keywords: MBG Program, Decree of the Head of the National Nutrition Agency No. 401.1 of 2025, Fiqh Siyasa Tanfidziyah.

PENDAHULUAN

Gizi memiliki peran fundamental sebagai pondasi utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Meskipun demikian, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan gizi multidimensi yang berimplikasi serius terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* pada balita masih berada pada angka 21,6%. Di saat yang bersamaan, masalah *wasting* meningkat hingga 7,1% , dan prevalensi obesitas anak naik menjadi 4,3% akibat pergeseran pola konsumsi, yang memicu terjadinya fenomena beban gizi ganda (*double burden of malnutrition*). (Kemenkes , 2025)

Situasi ini semakin diperburuk oleh munculnya fenomena beban gizi ganda (*double burden of malnutrition*), yakni kondisi ketika masalah kekurangan gizi berlangsung bersamaan dengan meningkatnya kasus kelebihan gizi. Data menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada anak mengalami kenaikan hingga 4,3%, yang dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat menuju makanan tinggi gula dan lemak, namun rendah kandungan serat. Tidak hanya itu, berbagai defisiensi mikronutrien juga masih banyak ditemukan, seperti anemia pada balita yang mencapai 28% serta kekurangan vitamin A, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, sehingga semakin memperlihatkan kompleksitas persoalan gizi di Indonesia (Fauzan, 2019).

Merespons kedaruratan gizi tersebut, pemerintah mengimplementasikan kebijakan strategis melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan. Program yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp450 triliun per tahun ini mulai berjalan pada 2 Januari 2025 dengan target 82,9 juta penerima manfaat. (welasari, 2025)

Secara yuridis, landasan teknis tata kelola program ini diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan jaminan normatif (*das sollen*) bahwa tahapan penyelenggaraan program wajib memenuhi prinsip gizi seimbang, menyajikan makanan yang higienis dan halal, serta mengedepankan transparansi anggaran guna mencegah pemborosan uang negara (SK Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025).

Namun, realitas empiris di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan tata kelola. Implementasi MBG di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung secara umum berhasil meningkatkan antusiasme siswa dan meringankan beban ekonomi orang tua. Akan tetapi, evaluasi dan laporan pada 24 November 2025 mengungkap sejumlah kendala operasional, meliputi ketidaksesuaian menu dengan selera murid, masalah cita rasa, hingga ditemukannya kualitas pangan yang menurun, seperti buah yang terlalu matang dan sebagian membusuk di dalam paket makanan. Temuan ini memunculkan kekhawatiran kritis mengenai efektivitas implementasi kebijakan dan efisiensi serapan anggaran negara di tingkat satuan pendidikan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika Program MBG dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian dari Ajeng Atikah Merlinda (2025) dalam artikel berjudul "Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan", yang mengkaji program ini menggunakan kacamata sosiologi pendidikan untuk melihat dampaknya terhadap motivasi belajar siswa (Merlinda, 2025). Kedua, studi yang dilakukan oleh Khafifah Andin (2025) berjudul "Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis", yang menyoroti program ini sebagai bentuk nyata pengejawantahan ideologi negara serta dampaknya dalam menurunkan kecemasan psikologis anak terkait ketersediaan makanan (Andin, 2025). Ketiga, riset dari Wahyu Trisno Aji (2025) dengan judul "Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo–Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?", yang menganalisis dilema makro implementasi program secara nasional, khususnya mengenai kepastian sumber pendanaan negara dan prioritas kebijakan (Aji, 2025). Keempat, kajian empiris berupa skripsi karya Syamsul Bahri ZR (2025) yang berjudul "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah)", yang meneliti program ini dalam cakupan wilayah manajerial tingkat kabupaten (makro) dengan membedah tahapan perencanaan hingga pengawasan (Bahri ZR, 2025). Kelima, artikel jurnal oleh Ikka Febryanti dkk (2025) berjudul "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)", yang secara khusus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat administratif kebijakan publik di sekolah dasar wilayah Malang (Febriyanti, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai efektivitas dan kendala teknis (pemborosan makanan/kualitas konsumsi) pada regulasi terbaru MBG menggunakan pisau analisis tata kelola eksekutif Islam belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan membedah kesenjangan implementasi Program Makan Bergizi Gratis terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional RI Nomor 401.1 Tahun 2025 secara mikro empiris di MIN 10 Bandar Lampung. Analisis dilakukan melalui perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* untuk menilai apakah kebijakan operasional tersebut telah sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umat) atau justru mencederai prinsip syariat akibat ketidakefektifan pengelolaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 bila ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian lapangan ini difokuskan dan dilaksanakan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung guna melihat kesesuaian antara realitas penerapan (*das sein*) dengan tujuan aturan (*das sollen*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terlibat

langsung, yang meliputi Kepala Madrasah, Dewan Guru, serta para siswa dan siswi sebagai subjek utama penerima manfaat program. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui penelusuran dokumentasi yang mencakup peraturan perundang-undangan, arsip resmi madrasah, laporan masyarakat dan berita, serta kepustakaan literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan fokus kajian.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yang bertujuan dari untuk memaparkan dan menggambarkan secara sistematis data lapangan yang telah terkumpul (Fajar ND, and Yulianto Achmad, n.d). Proses pengolahan data dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan data (*editing*) untuk memverifikasi validitas, kelengkapan, dan relevansi informasi dari lapangan (Setiawan, 2019), yang kemudian dilanjutkan dengan tahap klasifikasi (*classifying*) guna memilah dan mengelompokkan data mentah secara sistematis (Moleong, 1993). Data empiris yang telah diklasifikasikan tersebut selanjutnya dikaji dan diuraikan secara mendalam menggunakan kacamata *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*. Analisis ini secara esensial diarahkan untuk mengukur sejauh mana sinkronisasi antara norma hukum yang tertuang dalam regulasi pemerintah dengan realitas praktik tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di madrasah, khususnya dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip *al-Amānah* (akuntabilitas/tanggung jawab pemerintah), *al-‘Adalah* (keadilan dan moderasi), serta pencapaian *maslahah* (kemaslahatan umum). Lebih lanjut, guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Proses triangulasi tersebut dilakukan secara sistematis dengan membandingkan dan memverifikasi silang informasi yang diekstraksi dari hasil wawancara mendalam, pengamatan empiris (observasi), serta studi dokumentasi. Melalui pendekatan komprehensif ini, temuan akhir penelitian dipastikan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas akademik yang kokoh dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berawal dari diskursus kampanye pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2024, kebijakan ini secara fundamental dirancang sebagai bentuk intervensi negara untuk mengakselerasi peningkatan kualitas asupan gizi generasi muda. Implementasi kebijakan ini dilatarbelakangi oleh urgensi empiris terkait tingginya prevalensi malnutrisi dan *stunting* yang masih secara nyata membayangi anak-anak Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat rentan dengan status sosial-ekonomi menengah kebawah (Herdiana, 2025). Sebagai sebuah langkah intervensi afirmatif, program MBG menetapkan anak-anak, peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, serta ibu hamil sebagai sasaran prioritas. Penetapan target ini tidak terlepas dari landasan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud). Data tersebut mengindikasikan sebuah realitas memprihatinkan, di mana sekitar 41% peserta didik dilaporkan mengikuti proses pembelajaran dalam kondisi kelaparan (*hidden hunger*), sebuah situasi yang secara langsung berimplikasi pada degradasi daya tangkap kognitif dan penurunan kualitas capaian pendidikan secara nasional (Basit, 2025).

Secara operasional, tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlandaskan pada Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025. Regulasi teknis ini diorientasikan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sejalan dengan amanat konstitusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengingat skala pendistribusian sasaran yang masif, implementasi program ini menuntut penerapan standar keamanan gizi dan pangan yang ketat, serta tata kelola manajemen yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pemborosan secara ganda baik pemborosan pangan (*food waste*) maupun inefisiensi anggaran negara sekaligus memitigasi dampak ekologis dari sisa limbah yang dihasilkan (Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025). terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025, pengumpulan data empiris telah dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti telah melaksanakan serangkaian observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung, yang bertindak selaku lokus implementasi kebijakan dari pemerintah di tingkat satuan pendidikan dasar. Adapun pemaparan data dari hasil temuan lapangan dan wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Hasil wawancara dengan kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Kota Bandar Lampung, ibu Wiwin mengatakan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung diawali dengan persiapan yang matang. Pihak sekolah lebih dulu mendata jumlah seluruh penerima manfaat sekaligus mencatat jika ada siswa yang memiliki riwayat alergi terhadap makanan tertentu. Dalam praktiknya di lapangan, proses pendistribusian makanan dibagi menjadi dua sesi waktu dan dikelola secara teratur oleh guru yang bertugas piket.

Pada sesi pagi, makanan tiba di sekolah pada pukul 07:50 WIB. Setelah kelayakan dan keamanannya diperiksa oleh guru, makanan tersebut dibagikan kepada para siswa dengan pendampingan langsung dari wali kelas. Pengambilan kembali wadah atau kotak makan bekas pakai untuk sesi pertama ini dilakukan pada pukul 11:00 WIB. Selanjutnya, untuk sesi siang, makanan tiba dan mulai didistribusikan pada pukul 11:00 WIB, kemudian wadah makannya akan diambil kembali oleh pihak penyedia pada pukul 15:10 WIB.

Sebagai bahan evaluasi program, pihak sekolah menerapkan aturan bahwa sisa makanan siswa tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah. Sisa makanan tersebut dikumpulkan untuk dilihat dan dianalisis oleh pihak penyedia, sehingga mereka bisa mengetahui menu apa saja yang disukai atau kurang diminati oleh anak-anak. Selain itu, program ini juga bisa menyesuaikan dengan kondisi waktu tertentu. Misalnya, selama bulan Ramadan, menu yang dibagikan diganti menjadi menu kering berupa roti, buah, dan takjil (Wiwinsriani, Wawancara, 15 Maret 2026).

- 2) Hasil wawancara dengan guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Kota Bandar Lampung, ibu Trisnawati mengatakan Secara keseluruhan, dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah berjalan relatif kondusif tanpa adanya hambatan operasional yang bersifat fundamental maupun berkelanjutan. Meskipun demikian, pada fase awal implementasi, sempat teridentifikasi adanya kendala teknis minor terkait ketidaksesuaian komposisi menu, khususnya menyangkut ketidaklengkapan porsi buah-buahan dan lauk-pauk pendamping. Merespons temuan tersebut, pihak madrasah mengambil langkah yang responsif dan taktis dengan segera mengomunikasikan hasil observasi serta evaluasi lapangan secara langsung kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendorong optimalisasi dan perbaikan mutu layanan gizi (Trisnawati, Wawancara, 15 April 2026).
- 3) Hasil wawancara dengan beberapa orang siswa peneliti menemukan mayoritas siswa memberikan respon yang sangat positif terhadap implementasi program MBG. Tingginya tingkat penerimaan ini didorong oleh beberapa faktor pragmatis, meliputi efisiensi ekonomi berupa penghematan uang saku harian, serta kecocokan terhadap cita rasa

hidangan yang disajikan. Meskipun demikian, hasil observasi juga mencatat adanya sebagian kecil responden (5 siswa) yang menunjukkan respons netral. Sikap tersebut secara empiris dilatarbelakangi oleh fluktuasi preferensi personal, di mana tingkat kepuasan mereka sangat bergantung pada kecocokan terhadap rotasi menu harian yang didistribusikan oleh pihak penyedia gizi.

Analisis Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 Dalam Persepektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung

Secara konseptual, *Siyasah Tanfidziyah* merupakan domain spesifik dalam disiplin *Fiqh Siyasah* yang berfokus pada mekanisme eksekusi dan operasionalisasi peraturan perundang-undangan di suatu negara (Solihin, 2019). Ruang lingkupnya mengkaji secara komprehensif ranah implementasi hukum, diskursus konstitusi, hingga genealogi (sejarah) pembentukan sebuah regulasi. Sebagai induk keilmuannya, *Fiqh Siyasah* sendiri adalah pilar hukum tata negara Islam yang mendesain tata kelola pemerintahan dengan orientasi utama mewujudkan asas *maslahah* (kemaslahatan umum). Melalui kerangka inilah, *Fiqh Siyasah* menempati posisi krusial sebagai landasan untuk mengonstruksi sistem penyelenggaraan negara yang adil, transparan, dan senantiasa berpijak pada prinsip luhur syariat Islam (Iqbal, 2014).

Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 terkait operasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung menghendaki adanya integrasi nilai-nilai ketatanegaraan Islam (*Fiqh Siyasah*) secara komprehensif. Dalam kerangka analitis *Siyasah Tanfidziyah*, terdapat pilar-pilar esensial yang wajib diinternalisasi oleh pemangku kebijakan dan pelaksana lapangan guna memastikan suatu regulasi dieksekusi secara ideal, antara lain:

a. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah (*Mabda' al-Amānah*)

Pemerintah, melalui sinergi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak madrasah sebagai representasi *Ulil Amri*, memikul tanggung jawab moral dan yuridis untuk mewujudkan substansi kebijakan MBG. Konsep amanah dalam hal ini merepresentasikan tuntutan akuntabilitas publik yang mutlak. Secara praksis, penyelenggara diwajibkan untuk menjamin presisi distribusi, yang mencakup dimensi tepat sasaran (validitas penerima manfaat), tepat waktu (kepatuhan pada jadwal operasional), serta tepat mutu (pemenuhan standar higienitas dan gizi). Kelalaian dalam merealisasikan indikator teknis tersebut tidak sekadar menjadi bentuk malapraktik administratif, melainkan sebuah bentuk pengingkaran terhadap amanah kebijakan negara yang telah dititipkan.

b. Prinsip Penegakan Keadilan (*Mabda' al-'Adalah*)

Paradigma *Fiqh Siyasah* mengamanatkan agar setiap aparat pemerintah melaksanakan tata kelola kebijakan secara imparial dan nondiskriminatif. Keadilan (*al-'adalah*) senantiasa berkedudukan sebagai pilar sentral dalam sistem penyelenggaraan layanan publik berbasis hukum Islam (Nur, 2016). Manifestasi nilai keadilan dalam implementasi regulasi MBG di MIN 10 Bandar Lampung terwujud melalui pemenuhan hak asupan nutrisi yang setara dan proporsional bagi seluruh peserta didik. Hadirnya keadilan substantif ini direpresentasikan oleh ketiadaan disparitas (kesenjangan) kuantitas maupun kualitas porsi hidangan antar siswa. Lebih jauh, asas keadilan ini juga mencakup afirmativitas perlindungan, yakni pemberian atensi khusus dan penyesuaian menu bagi siswa dengan kerentanan medis (seperti riwayat alergi), guna menjamin keselamatan dan kesehatan paripurna bagi seluruh sasaran program.

c. Prinsip Orientasi Kesejahteraan Umum (*Mabda' Maslahah 'Ammah*)

Dalam diskursus *Fiqh Siyasa*, setiap intervensi kebijakan negara harus pada pencapaian *maslahah 'ammah* (kemaslahatan/kepentingan umum). Konsep ini merepresentasikan prinsip kesejahteraan di mana pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional sekaligus *syar'i* untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dieksekusi mampu menciptakan kemakmuran dan mengeliminasi kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat (Harahap, 2022).

Bila dikontekstualisasikan pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MIN 10 Bandar Lampung, prinsip kesejahteraan ini terwujud secara nyata melalui upaya sistematis negara dalam memberikan jaminan dasar pemenuhan gizi peserta didik. Program ini tidak sekadar dimaknai sebagai bantuan karitatif pemenuhan pangan, melainkan sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mereduksi disparitas kualitas kesehatan (mencegah malnutrisi), meringankan beban ekonomi keluarga kelas menengah ke bawah, serta memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan menyerap pendidikan secara optimal demi kesejahteraan bangsa di masa depan.

Berdasarkan konstelasi data dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung secara prinsipil telah selaras dengan kerangka filosofis *Siyasa Tanfidziyah*. Tata kelola kebijakan ini telah merepresentasikan pilar kepatuhan hukum, pelaksanaan wewenang sebagai amanah, serta orientasi penuh pada kemaslahatan umat (*maslahah*). Indikasi kesesuaian ini terefleksi secara nyata melalui sinergi aktif antara pemerintah, pihak madrasah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengeksekusi program pendistribusian makanan bergizi gratis guna menunjang kesehatan dan kualitas pendidikan para siswa.

Kendati demikian, pada tataran praksis operasional, pelaksanaan kebijakan ini masih memiliki ruang yang perlu terus dioptimalisasi. Hal ini teridentifikasi dari dinamika empiris pada fase awal implementasi, di mana sempat muncul kendala teknis minor terkait ketidaksesuaian komposisi hidangan khususnya menyangkut defisit proporsi buah dan lauk-pauk serta adanya fluktuasi tingkat kepuasan siswa terhadap variasi menu harian. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun regulasi dan sistem distribusi telah terbangun dengan baik, realisasi pemenuhan gizi di lapangan tetap rentan terhadap hambatan teknis dan evaluasi kelayakan *quality control*. Oleh karena itu, efektivitas program ini sangat bergantung pada kecepatan respons, pengawasan berkelanjutan, serta komunikasi yang adaptif antara pihak sekolah sebagai *end-user* dan SPPG sebagai penyedia layanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung secara esensial telah berjalan dengan baik dan selaras dengan kerangka normatif *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*. Pelaksanaan kebijakan ini telah merepresentasikan pemenuhan tiga pilar utama ketatanegaraan Islam, yakni:

- 1) Prinsip *Mabda' al-Amānah*, yang dibuktikan melalui tata kelola distribusi yang terstruktur, tepat waktu (berdasarkan pembagian dua sesi operasional), dan tepat sasaran;
- 2) Prinsip *Mabda' al-'Adalah*, yang tercermin dari kesetaraan pemenuhan porsi serta afirmativitas terhadap siswa dengan kondisi alergi; dan
- 3) Prinsip *Maslahah 'Ammah*, yang termanifestasi melalui tingginya tingkat akseptabilitas siswa akibat adanya efisiensi ekonomi (penghematan uang saku) serta pemenuhan nutrisi secara praktis.

Walaupun sistem secara umum telah mapan, pelaksanaan di lapangan masih

menyisakan catatan evaluatif. Kendala teknis pada awal pelaksanaan, seperti kurang presisinya takaran lauk dan buah, menegaskan bahwa konsistensi mutu (*quality control*) dari pihak penyedia mutlak diperlukan agar program ini tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan benar-benar menghadirkan gizi yang proporsional.

Sebagai implikasi dari temuan penelitian, direkomendasikan beberapa langkah strategis guna mengoptimalisasi program di masa mendatang. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan dapat lebih memperketat pengawasan mutu (*quality control*) terhadap standar komposisi gizi harian, serta proaktif menjadikan evaluasi sisa makanan siswa sebagai rujukan adaptif dalam merotasi menu agar tercipta keseimbangan antara selera anak dan standar nutrisi regulasi. Sejalan dengan hal tersebut, pihak madrasah didorong untuk terus mengawal kelancaran distribusi sekaligus mengintegrasikan kegiatan ini dengan edukasi karakter, yakni dengan menjadikan momen makan bersama sebagai sarana pembiasaan adab makan yang Islami dan kampanye pencegahan kemubaziran pangan (*food waste awareness*). Lebih jauh, guna memperkaya literatur akademik, peneliti lanjutan disarankan untuk mengekspansi lokus kajian pada jenjang pendidikan yang berbeda serta mengadopsi pendekatan metode campuran (*mixed-method*) untuk mengukur korelasi empiris secara langsung antara intervensi gizi harian ini terhadap akselerasi pertumbuhan fisik dan peningkatan prestasi akademik peserta didik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada sivitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*), atas dukungan moril maupun administratif selama proses penulisan artikel ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga diberikan kepada Kepala Sekolah dan jajaran guru MIN 10 Bandar Lampung yang telah memfasilitasi kelancaran observasi dan wawancara lapangan. Semoga riset mandiri ini mampu memberikan kontribusi secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan studi hukum ketatanegaraan Islam serta evaluasi kebijakan pemenuhan gizi nasional.

REFERENSI

- Andin, Khafifah. 2025. "Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 3(1):373–83.
- Basit, Muhammad. 2025. "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Journal of Economics Development Research* 1(2):53.
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. n.d. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.
- Febryanti, Ikka, Indiaty Indiaty, Muhammad Alwiadi Pane, and Pudji Astuti. 2025. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional (Studi Pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang)." *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7(1):67–79.
- Harahap, Solehuddin. 2022. "Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5(2):112–27. doi:10.55403/hukumah.v5i2.381.
- Herdiana, Dian. 2025. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(2):470–78.
- Ijazah, Fauzan. 2019. *Landscape Analysis Of Overweight And Obesity In Indonesia*. Unicef.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Kemenkes RI. 2025. *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>.

- Merlinda, Ajeng Atikah, and Yusmar Yusuf. 2025. "Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah Tinjauan Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7(2):1364–73. doi:10.38035/rrj.v7i2.1360.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur, Efa Rodiah. 2016. "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan." *Masalah-Masalah Hukum* 2(2):115–22. doi:10.14710/mmh.45.2.2016.115-122.
- Setiawan, Nugraha. 2019. "Metodologi Penelitian: Pengolahan Data Dan Analisis Data." 25–27.
- Solihin, Bunyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta.
- Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. 2025.
- Trisnawati. 2026. "Wawancara Guru MIN 10 Kota Bandar Lampung."
- Welasari, Genta Arief Gunadi, Joko Susilo Raharjo, Susiana Setianingsih, and Memorianus Amazihono. 2025. "Analisis Kemanfaatan Kebijakan Program Makan Siang Gratis Bagi Peserta Didik Dan Pemerintahan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9(1):7403–11.
- Wiwinsriani. 2026. "Wawancara Kepala Sekolah MIN 10 Kota Bandar Lampung."
- ZR, Syamsul Bahri. 2025. "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Syar'iyah)." IAIN Parepare.